

Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya

“Studi Kasus Pada Perempuan Ojek Online (Grab) Di Kota Surabaya”

M. Rizki Ramadiansyah¹⁾, Nihayatus Sholichah²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kikiramadiansyah27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) di Kota Surabaya dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Fokus penelitian meliputi efektivitas, efisiensi, dan kecukupan berdasarkan model evaluasi Kebijakan Winarno. Program GASPOL, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, mencakup pelatihan bela diri serta kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan rasa aman, keterampilan, dan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari informan yang terdiri atas orang dinas dp3ak, ketua program, anggota program, dan customer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan perlindungan dan rasa percaya diri peserta, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya partisipasi peserta, dan kendala dalam distribusi manfaat program. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program melalui penyediaan dukungan anggaran yang lebih besar, peningkatan sosialisasi program, dan melibatkan lebih banyak mitra strategis. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya keberlanjutan program dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi perempuan di sektor transportasi online.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan, Ojek Online (GASPOL)

Abstract

This study aims to evaluate the Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Program in Surabaya in enhancing the protection and empowerment of women working as online motorcycle taxi drivers. The study focuses on effectiveness, efficiency, and adequacy based on Winarno's policy evaluation model. Managed by the East Java Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population (DP3AK), the GASPOL program includes self-defense training and economic and social empowerment activities to improve the safety, skills, and well-being of female online motorcycle taxi drivers. This research employs a qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation. Data were gathered from informants, including DP3AK officials, program leaders, program members, and customers. The findings indicate that the program has had a positive impact on increasing participants' protection and self-confidence, despite several challenges such as budget constraints, low participant engagement, and difficulties in benefit distribution. The study recommends enhancing the program's effectiveness through increased budget support, improved program outreach, and greater involvement of strategic partners. Additionally, it highlights the importance of program sustainability in creating a safe and supportive working environment for women in the online transportation sector.

Keywords: Policy Evaluation, Women's Empowerment, Online Motorcycle Taxis (GASPOL)

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka sendiri, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Fokus pemberdayaan adalah pada upaya untuk menciptakan kesadaran dengan menyediakan akses ke daya sumber, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan mendorong orang untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memiliki kendali yang lebih besar atas aspek-aspek kehidupan mereka yang berdampak negatif pada mereka.

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan gender dan meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan yang setara. UN Women mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai proses dimana perempuan mendapatkan kendali lebih besar atas kehidupan mereka, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat hak-hak perempuan, serta memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Indonesia (APOI), jumlah pengemudi ojek online perempuan di Indonesia terus meningkat seiring dengan berkembangnya layanan transportasi online di berbagai kota besar, termasuk Surabaya. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mencatat adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor transportasi online. Namun, perempuan pengemudi ojol sering kali bekerja dalam kondisi yang rentan. Mereka harus menghadapi risiko kekerasan di jalanan, pelecehan seksual, hingga minimnya akses

terhadap layanan kesehatan dan asuransi sosial.

Terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah progresif dengan meluncurkan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Inisiatif ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi perempuan di sektor informal, sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial mereka melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Adanya pertemuan antara Gubernur Jawa Timur dengan Perempuan Pengemudi ojek online pada tanggal 30 Desember 2021 menjadi dasar dari terbentuknya GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek online). Para Perempuan memilih menjadi pengemudi ojek online karena tuntutan ekonomi, mereka harus mampu untuk menghidupi keluarganya namun pada saat yang bersamaan mereka juga harus tetap mengurus anak, suami, bahkan orang tua mereka. Tidak jarang ada pula anggota GASPOL yang bekerja sembari membawa anak mereka, dan ada juga anak dari pengemudi ojek online tersebut yang memiliki kebutuhan khusus namun harus tetap ikut ibu mereka untuk bekerja. Kondisi-kondisi ini tentunya semakin memberikan tekanan kepada Perempuan Pengemudi Ojek Online, karena pada saat yang bersamaan mereka harus menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sekaligus mengurus rumah tangganya. Apabila berbicara masalah keamanan, maka Perempuan yang menjadi pengemudi ojek online tentunya mereka menjadi sangat rentan dalam mengalami keekrasan seksual pada saat bekerja. Selain itu, terkadang mereka menerima diskriminasi, yaitu sering mendapatkan cancel orderan karena mereka adalah Perempuan dan penumpangnya adalah laki-laki. Selain itu, karena mereka harus bekerja sejak pagi hingga malam hari, mereka

tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri.

Kondisi seperti inilah yang menjadi keluhan pada Perempuan pengemudi ojek online. Merespon keluhan tersebut Gubernur Jawa Timur menugaskan DP3AK untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. DP3AK Provinsi Jawa Timur kemudian membentuk GASPOL sebagai jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perempuan Pengemudi Ojek Online.

Dasar hukum ojek online baik itu Pria atau Wanita, sejauh ini belum ada peraturan resmi yang mengatur ojek online, tetapi usulan yang diserahkan oleh DPR tentang ojek online, akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup perempuan ojek online, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan kerja. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di sektor transportasi online. Namun, meskipun program ini telah berjalan beberapa waktu, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas pelaksanaan program ini serta untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi program ini menjadi penting karena hasil evaluasi akan memberikan gambaran mengenai dampak nyata dari program terhadap perempuan pengemudi ojek online di Surabaya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Mardikanto dan Soebiato (2012) bahwa evaluasi program merupakan salah satu langkah krusial dalam siklus manajemen program untuk mengetahui keberhasilan program dan memberikan dasar bagi perbaikan di masa depan. Evaluasi yang komprehensif dapat mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program.

Kasus pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan oleh pengemudi ojek online di Surabaya sempat ramai

diperbincangkan di media. Salah satu kejadian yang mencuat adalah ketika seorang pengemudi Grab melakukan pelecehan fisik terhadap penumpang perempuan. Perusahaan Grab menanggapi dengan cepat, memutuskan hubungan kemitraan dengan pelaku dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk investigasi lebih lanjut. Mereka juga menawarkan dukungan psikososial kepada korban melalui layanan dari Komnas Perempuan untuk pemulihan.

Kasus pelecehan oleh mitra pengemudi ojek online (ojol) kembali terjadi. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu terjadi Senin (13/8) di daerah Surabaya. Korban yang diketahui seorang perempuan muda bernama Belafitria diketahui memesan layanan GrabRide dari Desa Bungurasih, Waru-Sidoarjo, ke arah Dukuh Kupang, Surabaya. Dalam perjalanan menuju tujuannya, korban dibawa mitra pengemudi GrabRide yang diketahui berinisial FF itu ke arah Sumur Welut. Dalam perjalanan itulah, FF yang mengendarai Mio warna merah bercampur putih dengan Nopol W 4625 OM itu mulai melancarkan aksinya dengan menggerayangi tubuh korban. Dalam insiden lain yang melibatkan seorang pengemudi ojek online dari aplikasi Maxim, seorang penumpang wanita di Makassar mengaku dilecehkan secara seksual. Pengemudi tersebut memeras payudara korban saat sedang dalam perjalanan. Korban segera melaporkan kejadian ini ke polisi, namun respons dari pihak aplikasi ojek online belum jelas. Insiden tersebut terjadi ketika N memesan ojek online untuk pulang dari kawasan Jalan Boulevard, Panakukang, pada Jumat (24/5/2024) dini hari sekitar pukul 02.45 WITA. Menurut keterangan N, pelecehan terjadi saat perjalanan menuju rumahnya. (Kontan.co.id)

Maka dari itu, sejak setahun lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), menginisiasi Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (Gaspol), salah satunya melalui pelatihan bela diri. Untuk melatih bela diri para perempuan pengemudi ojol, DP3AK Jatim bekerja sama dengan

Institut Ju Jitsu Indonesia. Di Kota Surabaya, latihan bela diri jujitsu dilakukan di salah satu ruangan di kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Jalan Raya Arjuno 88, Surabaya.

Program DP3AK ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada perempuan pengemudi ojol agar mereka dapat lebih merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaannya. Di kantor tersebut, puluhan perempuan pengemudi ojol setiap pekan datang berlatih bela diri jujitsu. Mereka dibekali ilmu bela diri dasar oleh tiga pelatih jujitsu, yakni Sabdo Sahono, Jaya Ariwibowo, dan Don Iskandar. Saat ini ada sekitar 30 perempuan pengemudi ojol yang tekun berlatih bela diri. (DP3AK, 2023)

Selain program perlindungan, disini juga ada Program pemberdayaan yang berjalan dalam "Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online" (GASPOL) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur berfokus pada meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi perempuan pengemudi ojek online. Salah satu contoh program nya yaitu, Kelas Politik dan Hukum - DP3AK bekerja sama dengan Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya untuk menyediakan pelatihan politik dan hukum bagi para peserta. Kelas ini membantu meningkatkan pemahaman perempuan ojek online mengenai hak-hak mereka serta aspek hukum dan politik yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat suatu masalah maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian tentang program GASPOL apakah sudah mampu melindungi dan memperdayakan pengemudi Perempuan ojek online di Kota Surabaya serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online di Kota Surabaya.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah

pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Abdul Wahab, (2012) mengatakan bahwa “kebijakan adalah apapun cakupannya, sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terpola, yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

Tujuan dari kebijakan publik secara dasar ialah untuk mewujudkan ketertiban yang berada disuatu wilayah kekuasaan ataupun ketertiban dalam menjalankan suatu sistem yang bersifat publik. Dengan adanya kebijakan maka secara personal masyarakat lebih mempunyai batasan dan aturan dalam proses implementasinya.

Beberapa tujuan kebijakan publik secara luas bisa bersifat politis, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Dalam lingkup politik, kebijakan publik menjadi media untuk mendistribusikan nilai-nilai berupa barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakatnya. Sedangkan dalam lingkup sosial, kebijakan publik memiliki tujuan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi kerusuhan publik atau konflik yang mungkin bisa terjadi, serta meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa melihat berbagai pandangan (Affrian, 2012).

Dalam buku (Anggara, 2014) dijelaskan elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yaitu:

- a. Lingkungan kebijakan (policy environment), yaitu elemen yang berasal dari yang mendasari suatu konflik atau isu masyarakat yang memberikan efek pengaruh kepada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.
- b. Kebijakan publik (public policies) yaitu, keputusan penyusunan dari beberapa instansi yang saling bersangkutan dan disusun dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu .
- c. Pelaku kebijakan (policy stakeholders), yaitu proses dalam memengaruhi dan yang dipengaruhi baik secara individu maupun dalam kelompok ataupun organisasi.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan pengembangan program selanjutnya (Widoyoko, 2012). Evaluasi juga merupakan penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, kemudian mengevaluasinya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk membuat keputusan mengenai objek evaluasi. (Wirawan, 2012).

3. Model Evaluasi William Dunn

Menurut Dunn (1990) kemudian, evaluasi memainkan jumlah fungsi yang utama dalam analisa kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a) Evaluasi memberikan informasi yang benar benar valid dan terpercaya tentang kinerja kebijakan, yaitu tentang sejauh mana kebutuhan, nilai dan

peluang telah dicapai melalui sebuah tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu (misalnya peningkatan kesehatan) dan target tertentu telah tercapai.

- b) Evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan sasaran. Nilai-nilai diklarifikasi dengan mendefinisikan dan mengoperasikan target dan tujuan.
- c) Evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan tentang apakah kinerja kebijakan cukup atau tidak untuk berkontribusi pada reformulasi masalah kebijakan. Dengan menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran perlu didefinisikan. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang disukai sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Sasaran dan tujuan dari berbagai pelaku yang telah diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan suatu ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai. Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas atribut (serangkaian prosedur yang diciptakan untuk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan) Brainstorming Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survey pemakai (serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya mengenai evaluabilitas

suatu kebijakan atau program (Nugroho, 2009)

William N. Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

- 1) Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan (efek), atau mencapai tujuan pelaksanaan tindakan. Efektivitas, yang berkaitan erat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dalam satuan produk atau jasa atau nilai moneter.
- 2) Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dalam bentuk biaya moneter.
- 3) Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.
- 5) Responsivitas (*responsiveness*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah

penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

- 6) Ketepatan (*appropriateness*).

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

4. Kriteria Evaluasi

Menurut Winarno (2002) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai .

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, meningkatkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan. Proses pemberdayaan biasanya mencakup pada pemberian akses seperti pendidikan, pelatihan, informasi sumber daya ekonomi, dan dukungan sosial yang dibutuhkan untuk peningkatan sumber daya manusia.

Pranarka dan Mueljarto dalam (Bahri, 2013) menjelaskan yang pertama pemberdayaan sebagai *power to nobody* dan yang kedua pemberdayaan sebagai *power to everybody*, maksud dari *power to nobody* adalah pemberdayaan dijadikan penghancur bagi kekuasaan hal ini terkemuka dikarenakan bahwa kekuasaan sudah mengasingkan serta menghancurkan eksistensi dari manusia. dengan landasan tersebut sudah barang tentu kekuasaan harus dihancurkan agar

manusia bisa terlepas dari penindasan dan marginalisasi. Selanjutnya, maksud dari *power to everybody* adalah menjadikan pemberdayaan sebagai pendistribusian kekuasaan hal ini dilandasi pada kekuasaan yang tersentral sehingga menyebabkan mengesampingkan hak normatif manusia yang tidak berdaya. Dengan begitu, sudah menjadi keharusan kekuasaan dibagikan kepada segenap manusia sehingga membuka ruang untuk mengembangkan kualitas diri manusia itu sendiri kearah perubahan yang lebih baik.

Kemudian, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam (Bahri 2013) menempatkan pemberdayaan sebagai *power to powerless* memberikan kekuatan terhadap yang lemah tanpa harus melenyapkan yang berkuasa atau yang kuat. Terkemukanya pendapat ini didasari oleh pendapat sebelumnya yang menjadikan pemberdayaan sebagai *power to nobody* dan *power to everybody* merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil dan menciptakan suasana yang berantakan atau anarki sehingga merusak tatanan bernegara. Dari penjelasan tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang ketiga ditempatkan sebagai antitesis karena yang paling realistis dari dua pendapat sebelumnya.

Sedangkan, Sumodiningrat dalam (Mulyono 2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan pengertian pemberdayaan dibarat disebut dengan *empowerment* yang memiliki arti pemberian kekuasaan sehingga kurang tepat bila penterjemahan tersebut diterapkan di Indonesia karena disini pemberdayaan lebih dikenal dengan memberikan daya bukan kekuasaan.

6. Aspek-Aspek Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan mencakup berbagai dimensi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik, yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemberdayaan perempuan:

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi berkaitan dengan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan, modal, dan peluang bisnis. Ini juga mencakup kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan finansial secara mandiri dan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja yang adil. Menurut Mayoux (2000), pemberdayaan ekonomi perempuan melibatkan perbaikan kondisi kerja, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap keuangan dan modal yang sebelumnya terbatas bagi perempuan.

b. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial berkaitan dengan perubahan persepsi terhadap perempuan dalam lingkungan sosial mereka. Hal ini mencakup upaya untuk menghapuskan norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan hanya di sektor domestik, serta mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas publik, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial. Malhotra dan Schuler (2005) berpendapat bahwa pemberdayaan sosial mencakup peningkatan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka, akses terhadap pendidikan, serta perubahan norma gender di masyarakat.

c. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan perempuan dalam politik berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini mencakup keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan perwakilan perempuan di parlemen.

d. Pemberdayaan Hukum dan Kelembagaan

Aspek ini mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, seperti akses terhadap keadilan, hukum yang mendukung kesetaraan gender, serta penghapusan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. UN

Women (2013) menegaskan pentingnya memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi perempuan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

e. Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan psikologis mencakup peningkatan rasa percaya diri, harga diri, dan keyakinan perempuan bahwa mereka dapat mengendalikan hidup mereka. Ini adalah komponen penting dari pemberdayaan, karena tanpa perubahan psikologis, perempuan mungkin tidak akan mampu memanfaatkan peluang yang diberikan. Zimmerman (2000) mendeskripsikan pemberdayaan psikologis sebagai kemampuan perempuan untuk mengembangkan identitas positif dan memiliki kontrol atas hidup mereka.

7. Ojek Online

Menurut Amiruddin (2019) lengkapnya Ojek Online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Banyaknya ojek didukung oleh kepemilikan sepeda motor yang semakin meningkat. Meskipun banyak digunakan oleh masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya ojek tidak ditetapkan sebagai transportasi umum (Amajida, 2016). Namun pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur khusus untuk ojek online yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Ojek online merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek online menggunakan

sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek online kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek online. Tidak hanya mengantar orang, ojek online dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan ataupun membeli makan kemudian diantar pada pelanggan ojek online. Hal ini yang membuat masyarakat yang berada di Kota Kediri dengan banyaknya aktivitas, ojek online kini hadir dan membantu masyarakat dalam melakukan padatnya aktivitas sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang.

Kemunculan dari maraknya ojek online di Indonesia dipelopori oleh Go-Jek yang diberi nama yaitu Go-Ride, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, melihat bahwa solusi untuk membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Permasalahan yang terlihat bukan hanya kemacetan, melainkan juga tarif ojek yang “tidak wajar” mahal. Ide dari bisnis ini juga berasal dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Entrepreneurship Program Indonesia. Kemudian direalisasikan menjadi sebuah start up yang berbasis teknologi untuk operasionalnya. Selanjutnya muncul GrabTaxi di Indonesia pada tahun 2014.

Awalnya GrabTaxi hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan taksi offline dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar dari transportasi motor dan mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan ranah bisnisnya dengan memberi nama GrabBike untuk ojek motornya. Untuk saat ini, Grab merupakan pesaing kuat dari Go-Jek. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran

dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Salah satu transportasi online yang paling sering digunakan adalah ojek online.

Ojek online merupakan ojek atau jasa antar jemput penumpang yang sistem pemesanannya berbasis aplikasi smartphone. Sistem pembayarannya bisa melalui cash atau digital payment. Dalam aplikasi tersebut dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, identitas driver yang menjemput, serta perusahaan pengelolaannya. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Salah satu transportasi online yang paling sering digunakan adalah ojek online.

Ojek online yaitu ojek yang memanfaatkan teknologi aplikasi digital untuk pelayanannya (Priawala, 2016). Jika dibandingkan dengan ojek konvensional, ojek online memiliki lebih banyak kelebihan seperti tempat penjemputan dan pengantaran dapat ditentukan langsung oleh pengguna jasa. Selain itu, tarif perjalanan sudah tertera sehingga dapat diketahui besar nominalnya pada aplikasi ketika pengguna jasa memesan ojek online. Sedangkan pada ojek konvensional, pengguna jasa tidak mengetahui berapa tarif yang harus dibayar sehingga sering terjadi pengemudi memasang tarif terlalu tinggi (Rifaldi et al., 2016). Kelebihan lainnya yaitu ojek online lebih mudah untuk ditemukan dan dapat dihubungi di mana saja, tidak seperti ojek konvensional yang harus ditemui di pangkalan ojek (Perdana dan Lestari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Medeiros et al. (2018) menunjukkan bahwa penggabungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal aplikasi ojek online memiliki peran yang penting pada pendapatan pengemudi ojek, distribusi di seluruh wilayah dan jarak harian rata-rata, jumlah total pengemudi, dan jumlah perjalanan

ojek yang beroperasi setiap harinya. Hal ini juga yang mempengaruhi kepuasan penumpang atau pengguna ojek online tentang persepsi keselamatan jika dibandingkan dengan ojek konvensional. Pengguna ojek konvensional melaporkan tingkat persepsi dan kepuasan keselamatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pengguna ojek online.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. “Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain”. (Siyoto & Sodik, 2015). “Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati”. (Siyoto & Sodik, 2015).

Pemilihan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini disebabkan karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pelayanan jasa ojek online sebagai sarana transportasi Masyarakat di kota Surabaya, sehingga peneliti berusaha untuk mencari, mengumpulkan, memahami, mendeskripsikan informasi dan pendapat dari informan penelitian sesuai dengan fenomena atau hal yang diteliti.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan yang mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti (Moleong, 2006). Fokus penelitian menjadi sangat penting untuk menjaga alur penelitian yang terarah dan menjelaskan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, untuk memastikan bahwa peneliti tetap

terkonsentrasi pada inti masalah dan objek penelitian, maka penentuan fokus penelitian sangatlah dibutuhkan agar mencegah peneliti terjebak pada bidang yang sangat umum, luas atau tidak relevan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT DP3AK (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan) Jalan Arjuno No.88, Sawahan, Surabaya dan Kantor DP3AK PROV JATIM Jalan Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menurut Creswell (2014), hasil dari pembahasan adalah temuan yang didapat dari analisis data yang telah dikumpulkan. Temuan ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung atau menyanggah hipotesis. Komponen-komponen pembahasan hasil penelitian meliputi: Interpretasi data, Kaitan dengan literatur yang ada, Implikasi temuan, Keterbatasan penelitian.

Tujuan pembahasan hasil penelitian adalah: Menyajikan interpretasi terhadap temuan, Menyampaikan simpulan, Memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, Memberikan pemahaman yang jelas mengenai kontribusi hasil penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (Grab) Dalam Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Surabaya" bahwa peneliti akan membahas hasil penelitian dengan menggunakan 3 indikator dari teori Winarno yaitu Efektivitas, Efisiensi, dan Kecukupan.

1. Efektivitas

Program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) diluncurkan untuk merespons beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengemudi perempuan ojek online. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ranti, analis DP3AK, program ini didorong oleh fakta bahwa tingkat pendapatan perempuan di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan provinsi lain. Selain itu, program ini bertujuan untuk meminimalkan risiko

yang dihadapi pengemudi perempuan, seperti pelecehan seksual dan kekerasan lainnya, yang sering terjadi di jalan.

Program GASPOL memiliki misi pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus melindungi mereka dari bahaya pekerjaan di jalan. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan perempuan melalui dukungan dan pelatihan yang relevan.

a) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi efektivitas program dilakukan melalui koordinasi dengan grup koordinator yang dibentuk oleh DP3AK. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ranti, grup ini sering mengadakan diskusi untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari anggota. Selain itu, grup-grup tematik seperti grup masak atau kerajinan tangan juga digunakan untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan usaha para peserta.

Namun, evaluasi tahunan yang mengandalkan data dari kelompok ini mungkin memerlukan sistem pelaporan yang lebih formal agar dapat memastikan hasil yang terukur dan konsisten.

b) Tujuan Utama Program GASPOL

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dea, ketua program GASPOL, tujuan utama dari program ini adalah:

1. Mengurangi risiko yang dihadapi pengemudi perempuan di jalan, seperti pelecehan seksual, kekerasan, dan kecelakaan.
2. Memberikan peluang bagi pengemudi perempuan untuk beralih dari pekerjaan di jalanan ke bidang lain yang lebih aman dan stabil.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Program ini juga bertujuan menciptakan solidaritas dan dukungan antar anggota, serta memberikan keterampilan baru yang dapat

dikembangkan untuk sumber penghasilan alternatif.

c) Efektivitas Pelatihan dan Bantuan Program

Pelatihan yang diberikan oleh program GASPOL mencakup berbagai bidang, seperti:

1. Keterampilan Usaha Mikro:

Pelatihan bakery yang diajarkan telah membantu peserta memahami cara membuat produk kue yang dapat dijual. Hal ini menunjukkan fokus pada pengembangan UMKM untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Bela Diri:

Pelatihan jujitsu sangat relevan bagi pengemudi perempuan yang sering menghadapi risiko keamanan di jalan. Ilmu bela diri ini menjadi langkah preventif yang signifikan dalam melindungi diri dari ancaman.

3. Bantuan Peralatan dan Sembako:

Stimulus ini memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha kecil peserta. Namun, beberapa responden menyebutkan perlunya kesinambungan dukungan ini agar manfaatnya lebih terasa.

Dari wawancara dengan para peserta, efektivitas pelatihan dinilai tinggi, namun ada beberapa saran untuk meningkatkan fleksibilitas jadwal pelatihan agar lebih banyak peserta dapat mengikutinya.

d) Alasan Bergabung dalam Program GASPOL

Menurut hasil wawancara dari anggota GASPOL mereka mengungkapkan bahwa perlindungan adalah alasan utama mereka bergabung. Mereka merasa lebih aman karena adanya pemantauan melalui grup dan solidaritas antar anggota. Selain itu, mereka mengapresiasi program pelatihan dan kegiatan ibadah bersama yang mempererat hubungan sosial antar anggota. Hal ini menciptakan rasa persaudaraan yang kuat di antara pengemudi perempuan.

Selain itu mereka mengungkapkan bahwa program ini membantu mereka mengembangkan diri melalui pelatihan keterampilan baru dan memberikan rasa aman saat bekerja di jalan. Namun, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pola pikir individu dalam memanfaatkan pelatihan dan bantuan yang diberikan.

e) Perspektif Pelanggan tentang Pengemudi Perempuan

1. Keamanan dan Kenyamanan:

Pelanggan merasa lebih aman saat menggunakan layanan yang disediakan oleh pengemudi perempuan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Pengemudi perempuan dianggap lebih berhati-hati dan komunikatif.

2. Kesetaraan Gender:

Kehadiran pengemudi perempuan dipandang sebagai langkah besar menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi.

3. Tantangan dan Dukungan:

Meskipun ada tantangan seperti risiko keamanan dan stereotip sosial, dukungan dari perusahaan dan pemerintah dianggap penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman.

Program GASPOL menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelatihan keterampilan dan menciptakan solidaritas di antara pengemudi perempuan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti mekanisme monitoring yang lebih formal, fleksibilitas jadwal pelatihan, dan kesinambungan dukungan usaha. Keberadaan pengemudi perempuan juga diapresiasi oleh pelanggan karena memberikan rasa aman dan memberdayakan perempuan dalam sektor transportasi.

2. Efisiensi

Program GASPOL merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek online melalui berbagai pelatihan dan program pendukung. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi aktif dari beberapa peserta, dan kesulitan dalam melakukan pendataan yang komprehensif untuk menilai keberhasilan program. Selain itu, konflik antaranggota dan keterbatasan sumber daya manusia untuk pendampingan juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun demikian, program ini berhasil memberikan dampak positif, terutama dalam hal meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi peserta melalui pelatihan bela diri serta kebijakan anti-pelecehan yang diterapkan.

Dampak positif program ini tidak hanya terlihat pada peningkatan perlindungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi peserta. Banyak peserta melaporkan peningkatan pendapatan serta keterampilan baru yang relevan untuk pekerjaan mereka, seperti manajemen keuangan dan sertifikasi di bidang tertentu. Selain itu, komunitas pengemudi perempuan yang terbentuk melalui program ini membantu meningkatkan solidaritas dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat, seperti kecelakaan atau masalah teknis di lapangan.

Dari perspektif pelanggan, program ini mendapat tanggapan positif meskipun masih ada beberapa saran perbaikan. Pelanggan menyarankan penambahan pelatihan soft skills seperti manajemen konflik, pengelolaan waktu, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, peningkatan teknologi pendukung seperti fitur keamanan dalam aplikasi juga dianggap penting untuk memberikan rasa aman yang lebih besar bagi pengemudi

perempuan. Kampanye publik untuk mengubah stereotip tentang perempuan di sektor transportasi juga dianggap perlu untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pengemudi perempuan.

Bisa peneliti simpulkan secara keseluruhan, program GASPOL memiliki dampak signifikan dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman di sektor transportasi. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penambahan sumber daya manusia untuk pendampingan, pengembangan sistem monitoring yang lebih baik, serta inovasi dalam teknologi dan pelatihan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan di Indonesia.

3. Kecukupan

Program GASPOL dirancang untuk memberdayakan perempuan pengemudi ojek online melalui berbagai pelatihan dan dukungan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak, ditemukan bahwa alokasi sumber daya untuk pelatihan masih kurang memadai.

Kendala utama yang dihadapi peserta adalah manajemen waktu, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maita dan Ibu Ima. Banyak peserta kesulitan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan pelatihan. Materi pelatihan yang terkadang kompleks juga memerlukan waktu tambahan untuk dipahami. Selain itu, beberapa peserta mengungkapkan perlunya dukungan untuk pemasaran dan penyediaan tempat usaha, karena banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru di luar lingkungan mereka.

Dari sisi pelanggan, pandangan terhadap pengemudi perempuan cukup positif. Beberapa pelanggan merasa lebih nyaman dengan pengemudi perempuan karena keramahan dan kehati-hatian

mereka. Namun, keamanan pengemudi perempuan menjadi perhatian, terutama saat malam hari. Pelanggan menyarankan adanya fitur tombol darurat di aplikasi, pelatihan khusus untuk menghadapi situasi berisiko, dan zona tunggu aman yang didesain khusus untuk perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara ini, ada beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas program GASPOL. Pertama, alokasi sumber daya perlu ditingkatkan agar pelatihan menjadi lebih maksimal, baik dari segi peralatan maupun durasi. Kedua, kolaborasi antar-lembaga harus terintegrasi dengan lebih baik agar program ini memiliki dampak yang berkelanjutan. Ketiga, dukungan pemasaran melalui platform digital dan penyediaan tempat usaha strategis perlu diprioritaskan. Keempat, aspek keamanan pengemudi perempuan harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui pelatihan dan fitur aplikasi yang mendukung. Dengan langkah-langkah ini, program GASPOL diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain pelatihan pelatihan yang di berikan oleh DP3AK, DP3AK membuka kerja sama juga dengan pihak lain, bila mana ada acara seperti sosialisasi Bersama ibu ibu anggota program gaspol dan lain-lainnya.

Pada tanggal 30 januari 2025, DP3AK mendapatkan kerja sama dengan salah satu universitas negeri di Surabaya, yaitu UINSA. Pada kerja sama ini pihak UINSA akan melakukan sosialisasi stranas tentang PPA (Pencegahan Perkawinan Anak) Bersama ibu ibu anggota program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) yang dilaksanakan di UPT DP3AK jalan Arjuno no.88 Surabaya, yang isi materi sosialisasi tersebut adalah tentang pencegahan pernikahan di usia remaja.

4. Evaluasi program pada tahun 2023 dan 2024

Evaluasi program 2023:

Ada beberapa pelatihan itu Dimana desember 2023 para anggota atau peserta pelatihan itu melakukan wisuda, dengan total 200 peserta ojol yang di wisuda. Di wisuda ini ada beberapa jenis pelatihan atau pun kelas, seperti kelas memasak, tata rias atau kecantikan, kelas hukum dan politik. Pelaksanaan wisuda tersebut di laksanakan pada perayaan hari ibu di Hotel Samathor.

Evaluasi program 2024:

Selama di tahun 2024 ini hanya melakukan monitoring para peserta yang sudah melakukan pelatihan pada tahun 2023 dan wisuda, apakah berhasil atau tidak nya para peserta itu membuka suatu usaha yang mereka sudah tekuni di tahun 2023 lalu dan di 2024 itu juga akan ada kelas baru lagi seperti di tahun 2023 yang di isi 20 peserta dari para anggota di semua kelas atau pelatihan. Jadi yang para anggota belum mengikuti kelas atau pelatihan di 2023, bisa mengikuti kelas atau pelatihan di tahun 2024 yang masing masing kelas tersebut di ikuti 20 peserta dan juga mereka yang telah mengikuti kelas di tahun 2024, akan di wisudakan di tahun ini (2025) dalam waktu dekat.

5. Kendala Program GASPOL

Hambatan utama yang dihadapi oleh DP3AK meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi aktif dari beberapa peserta, dan kesulitan dalam melakukan pendataan yang komprehensif untuk menilai keberhasilan program. Selain itu, konflik antar anggota dan keterbatasan sumber daya manusia untuk pendampingan juga menjadi tantangan yang signifikan.

Selain itu ada juga kendala utama yang dihadapi peserta adalah manajemen waktu. Banyak peserta kesulitan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan pelatihan. Materi pelatihan yang terkadang kompleks juga memerlukan waktu tambahan untuk dipahami. Selain itu, beberapa peserta mengungkapkan perlunya dukungan untuk pemasaran dan penyediaan tempat usaha, karena banyak dari mereka menghadapi

kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru di luar lingkungan mereka.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa program ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online. Dari sisi perlindungan, program ini telah berhasil menciptakan rasa aman dan percaya diri melalui pelatihan bela diri yang difasilitasi oleh DP3AK Jawa Timur bekerja sama dengan Institut Ju Jitsu Indonesia. Hal ini terbukti meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi risiko di lapangan. Selain itu, inisiatif kelas edukasi hukum dan politik yang diberikan kepada peserta juga membantu mereka lebih memahami hak-hak mereka, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Ada juga kelas pelatihan memasak, kerajinan dan rias untuk melatih skill mereka dan juga hasil dari pelatihan tersebut bisa mereka kembangkan lagi untuk mereka membuka bisnisnya, supaya mereka tidak terus menerus di jalan.

Namun, meskipun program ini memberikan dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama yang memengaruhi skala program dan cakupan peserta. Selain itu, jadwal pelatihan yang kurang fleksibel menyulitkan banyak perempuan pengemudi untuk berpartisipasi secara optimal. Tantangan lain adalah kurangnya evaluasi berkala yang menyebabkan keterbatasan data untuk mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program. Meski begitu, keberhasilan awal program ini menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi inisiatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program GASPOL, beberapa saran dapat disampaikan. Pertama, pemerintah perlu memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan transportasi online, untuk mendukung pengembangan dan pendanaan program. Kedua, sosialisasi program harus ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak perempuan pengemudi ojek online, khususnya di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Penyesuaian jadwal pelatihan juga penting agar lebih sesuai dengan waktu luang para peserta, sehingga partisipasi dapat meningkat. Ketiga, evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tujuan yang ditetapkan tercapai. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti daring atau aplikasi khusus untuk memudahkan pengumpulan data dari peserta. Selain itu, cakupan program dapat diperluas dengan menambahkan pelatihan keterampilan baru, seperti literasi digital, pengelolaan keuangan, dan keterampilan usaha lainnya, yang relevan dengan kebutuhan perempuan pengemudi.

Terakhir, pemerintah perusahaan transportasi online perlu menyediakan fasilitas keamanan yang lebih baik, seperti asuransi dan keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan pengemudi dari berbagai risiko di lapangan. Dengan langkah ini, diharapkan GASPOL tidak hanya memberikan dampak positif bagi perempuan pengemudi ojek online di Surabaya, tetapi juga dapat menjadi contoh program pemberdayaan yang efektif dan inklusif di daerah lain di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Indonesia (APOI), "Data Pengemudi Ojek Online di Indonesia," 2023.
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Impact of reservation in Panchayati Raj: Evidence from a nationwide 239ompa239zed*

experiment. *Economic and political Weekly*, 979-986.

Freire, Paulo (1988). "Pedagogy of the Oppressed". Potugis: Brazilian Educator

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012)., "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi," *Alfabeta Bandung*.

Nawawi, Ismail. 2015. (2009). *Public Policy*. Surabaya : PMN

Sen, Amartya (2000). "Development as Freedom". Amerika: Oxford University Press

Jurnal

Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India*. *Econometrica*.

Ferdila dan anwar. (2021). *Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi*. *IJIEB*, 6(2), 134–142

Handayani, S. (2020). "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Informal: Studi Kasus Pengemudi Ojek Online," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.

Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. Development and Change.

Kusumastuti, T. (2019). "Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Informal," *Jurnal Sosial Ekonomi*.

Mosedale, S. (2005). *Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework*. *Journal of International Development*.

Mayoux, L. (2000). *Microfinance and the Empowerment of Women: A Review of the Key Issues*. International Labour Organization.

Mayoux, L. (2000). *Micro-finance and the empowerment of women*. International Labour Organization.

Malhotra, A., & Schuler, S.R. (2005). *Women's Empowerment as a Variable in International*

Development. Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives. *I*(1), 71-88.

UN Women (2013). *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice*.

Zimmerman, M.A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*.

Website

<https://www.dp3ak.jatimprov.go.id/media/dokumen/Pedoman%20Teknis%20GASPOL.pdf>
DP3AK PROVINSI JAWA TIMUR.
<https://dp3ak.jatimprov.go.id/halaman/status-gaspol-7oqbO4848a40f965a1a77b873f2dddfe7fc4722a689e1>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5021095/7-tujuan-kebijakan-publik-simak-penjelasan-para-ahli>

<http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>

<https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>

<https://ebizmark.id/artikel/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20dasar%20pemikiran,dasar%20penulisan%20sebuah%20karya%20tulis>.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5300187/15-pengertian-evaluasi-fungsi-tujuan-dan-tahapannya>

<http://digilib.unila.ac.id/938/9/BAB%20II.pdf>
https://www.researchgate.net/profile/Muh-Akbar-5/publication/324079382_Studi_Evaluasi_Kebijakan_Evaluasi_Beberapa_Kebijakan_di_Indonesia/links/5abc7aeeaca27222c7537bff/Studi-Evaluasi-Kebijakan-Evaluasi-Beberapa-Kebijakan-di-Indonesia.pdf

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/06/membekali-perempuan-dengan-bela-diri-dan-strategi-pendampingan>